

ANALISIS SISTEM POLITIK PEMERINTAHAN BELANDA DI JAMBI (1906-1942) : STUDI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PEMBELAJARAN SEJARAH

Wildan Luktiandi¹, Reka Seprina²

luktiandiw@gmail.com¹, reka.seprina@unja.ac.id²

Pendidikan Sejarah, Universitas Jambi^{1,2}

Abstrak: Tulisan ini membahas sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi sebagai pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan materi sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi sebagai materi pembelajaran sejarah Indonesia dan untuk peminatan sejarah bagi siswa SMA. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber kepustakaan yang menggunakan teknik analisis sejarah yang menggunakan interpretasi fakta sejarah yang meliputi buku, dokumen, jurnal dan observasi terkait sistem politik pemerintahan Belanda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatera yang memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga Belanda tertarik untuk menguasai Jambi dan Belanda membentuk Jambi sebagai daerah karesidenan. Sistem politik pemerintahan Belanda dapat dijadikan sebagai bahan ajar mata pelajaran sejarah Indonesia dan peminatan sejarah yang dapat dimasukkan dalam buku pelajaran untuk kemudian diterapkan sesuai dengan materi yang berkaitan dengan K.D sistem politik pemerintahan Belanda. Penggunaan bahan ajar sejarah Indonesia dengan materi analisis sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi juga bermanfaat untuk menanamkan rasa cinta tanah air, membangun jiwa patriotism, rasa nasionalism dan bela negara pada siswa.

Kata kunci: Bahan Ajar, Belanda, Pemerintahan, Politik, Sejarah

Abstract: This paper discusses the political system of the Dutch government in Jambi as the development of teaching materials in learning history. This study aims to identify the feasibility of the material on the political system of the Dutch government in Jambi as learning material for Indonesian history and for specializing in history for high school students. The method used in writing this research uses a qualitative research method that uses a descriptive research approach. The sources used in writing this research are literary sources that use historical analysis techniques that use interpretations of historical facts which include books, documents, journals and observations related to the political system of the Dutch government. The results of this study indicate that Jambi is one of the areas in Sumatra which has abundant natural wealth so that the Dutch are interested in controlling Jambi and the Dutch form Jambi as a residency area. The Dutch government political system can be used as teaching material for Indonesian history subjects and history specialization which can be included in textbooks to then be applied according to material related to K.D of the Dutch government political system. The use of Indonesian history teaching materials with material for analyzing the political system of the Dutch government in Jambi is also beneficial for instilling a sense of love for the motherland, building a spirit of patriotism, a sense of nationalism and defending the country in students.

Keywords: Teaching Materials, Netherlands, Government, Politics, History

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah dikunjungi dan dijajah oleh bangsa Barat selama berabad-abad. Bangsa penjajah ini datang ke Nusantara membawa semangat imperialisme dengan semboyan terkenal "Gold (mencari kekayaan), Glory (mencari kemuliaan), dan Gospel

(semangat menyebarkan agama Kristen)". Dalam catatan sejarah, bangsa Barat adalah bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda yang menguasai Nusantara sekaligus saling berebut kekuasaan.

Jambi adalah salah satu wilayah kecil di Sumatera yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, kekayaan alam ini menjadikan Belanda tertarik untuk menguasai Jambi. Usaha yang dilakukan Belanda untuk menguasai Jambi berhasil dengan membentuk Jambi menjadi salah satu wilayah keresidenan Netherland (Putri, 2021:1). Politik kolonial Belanda sebenarnya ialah suatu usaha untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan memanfaatkan potensi yang ada di suatu wilayah tersebut, dengan cara perundangan maupun cara kekerasan.

Pada tahun 1602 VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) mendapatkan hak monopoli perdagangan Hindia Timur dan mempunyai hak politik. Jambi sejak dulu sudah terkenal dengan daerah yang menghasilkan lada dan hutan lainnya. Pada tahun 1615 ada sebuah kapal Belanda yang bernama Japen Van Amsterdam mengunjungi Jambi, kapal ini dibawah pimpinan Abraham Streeck. Pertama kali yang dilakukan Belanda adalah meyakinkan maksud baiknya kepada penguasa kesultanan Jambi dan menghasut agar Inggris dilarang Berdagang lagi di Jambi. Kemudian hasutan itu berhasil sebab raja menjamin walaupun orang Inggris bebas berdagang, ia tidak akan mengizinkan Inggris untuk mendirikan kantor dagang di sebidang tanah manapun dengan artian Belanda mendapatkan izin untuk mendirikan kantor dagang. Pada tahun 1616 Ioji (kantor dagang) Belanda didirikan di MuaraKumpeh, namun tujuh tahun kemudian terpaksa harus ditutup karena tidak dapat berhubungan baik dengan rakyat Jambi. Rakyat Jambi melakukan perlawanan terhadap kedatangan Belanda karena, rakyat Jambi merasa Belanda tidak hanya memonopoli pedagangan tapi juga melakukan campur tangan dalam usaha pemerintahan dan dalam pergantian Sultan.

Pada tanggal 25 September 1858 Belanda melakukan penyerangan ke wilayah Jambi dibawah pimpinan Mayor Van Iangen. Dengan adanya penyerbuan ini Jambi jatuh ketangan Belanda dan Sultan Thaha melarikan diri ke Garo. Kemenangan Belanda atas Jambi merubah tatanan struktur pemerintahan dari Kesultanan ke Karesidenan pada tanggal 4 Mei 1906. Resseniden petama di Jambi adalah o.l. Helfrich dan dengan ini kekuasaan Belanda di Jambi dimulai. Sejak tahun 1906 Jambi ditetapkan menjadi ibu kota pemerintahan kolonial Belanda, hal ini membuat Belanda mendirikan pusat pemerintahan kolonial di Muara Tembesi untuk memantau pergerakan putra raja dari tepian Sungai Batanghari. Belanda berhasil menerapkan strategi ini untuk mempertahankan kekuasaannya di Jambi (Putri, 2021:38).

Jatuhnya Jambi ketangan Belanda membuat serangkaian perubahan seperti pemerintahan dan kekuasaan diJambi yang membuat kesultanan Jambi berubah menjadi Karesidenan Belanda. Dari th. 1858 - 1942 Belanda menerapkan kebijakannya diJambi seperti dibidang politik. Belanda menerapkan politik liberal yg merupakan Ideologi bangsa barat (Seprina, 2021:89).

Dalam sistem politik liberal terdapat 2 bentuk sistem politik lainnya, yaitu sistem politik pintu terbuka dan sistem politik etis yang dikenal dengan sistem kerja upahan. Pada tahun 1928 NVNIAM (*Namloze Vennotschap Nederlandsch Indiesche Aardolie Matschapij*) berhasil mendapatkan persetujuan untuk mengebor sumur minyak diBajubang yang dikenal sebagai sumur terbaik dan terbesar didunia. Oleh karena itu,

NIAM menjadikan Bajubang sebagai pusat perkantoran dan saat itu dikenal sebagai Kota Minyak. Puncak produksi minyak terjadi saat NIAM mampu memproduksi 30.000 barel minyak per hari. Pada tahun 1930 Belanda membuka swastanisasi perkebunan seluas-luasnya di Batanghari dengan memanfaatkan tanah yang subur dan sangat cocok untuk ditanami karet dan kelapa sawit yang prospeknya sangat menguntungkan di pasar dunia (Asmarita dkk, 2022:174).

Materi pembelajaran adalah satuan atau perangkat pembelajaran yang meliputi bahan pembelajaran, metode pembelajaran, batasan dan metode penilaian, yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: pencapaian kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan pemerintahan di Indonesia. Menurut (Magdalena dkk, 2020:312) Bahan ajar adalah bahan pembelajaran yang digunakan guru dan siswa secara sistematis dalam pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari beresama Guru matapelajaran sejarah di SMAN 8 Kota Jambi yaitu Pak R, Beliau mengatakan bahwa bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran sejarah yaitu berupa buku paket dengan judul Sejarah Indonesia kelas XII yang ditulis oleh Ratna Hapsari dan M. Adil yang diterbitkan oleh Erlangga tahun 2013. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa belum pernah mengajarkan topik tentang sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi karena untuk materi pembelajaran di kelas mengacu pada buku paket Sejarah Indonesia Kelas XII yang ditulis oleh Hapsari dan M. Adil yang diterbitkan oleh Erlangga. Dimana buku ini khususnya pada materi Kolonialisme-Imperialisme lebih menjelaskan perlawanan yang terkenal saja, seperti Perlawanan rakyat Aceh, Rakyat Maluku, dan Perlawanan di Jawa.

Berdasarkan observasi tersebut penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang sistem politik pemerintahan Belanda yang terjadi di Jambi yang dapat menjadi sumber pengembangan bahan ajar pembelajaran sejarah. Karena penggunaan bahanajar sejarah Indonesia dengan materi analisis sistem politik pemerintahan belanda di Jambi bermanfaat juga untuk untuk menanamkan rasa cinta tanah air, membangun jiwa patriotism, rasa nasionalism dan bela negara pada siswa/i. (Seprina, 2022:4). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem politik pemerintahan Belanda pada tahun 1906-1942.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif, karna dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai sistem pemerintahan politik Belanda di Jambi. Metode ini menggunakan teknik pengumpulan data sedalam-dalamnya. Maka dengan menganalisis sistem pemerintahan politik belanda diharapkan dapat bermanfaat untuk pendidikan sebagai bahanajar pelajaran sejarah yang berkaitan dengan materi penjajahan Belanda.

Penelitian ini dilaksanakan pada matapelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan kelas XII di SMAN 8 Kota Jambi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara, penelusuran arsip dan studi Pustaka. Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara meninjau di lokasi dan waktu penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi terhadap sistem pemerintahan politik Belanda di Jambi. Selanjutnya melakukan wawancara dengan pertanyaan yang tersusun

terhadap guru mata kuliah sejarah di SMAN 8 Kota Jambi yaitu Pak R pada hari sabtu, tanggal 4 Februari 2023. Kemudian melakukan penelusuran arsip untuk mencari data mengenai Sistem pemerintahan politik Belanda di Jambi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga fungsi dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan inferensi, yaitu sebagai berikut: (1) reduksi data, suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan darinya; (2) Menyajikan informasi, menyusun laporan penelitian sedemikian rupa sehingga informasi yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis; (3) menarik kesimpulan yaitu hasil akhir dari analisis data dan evaluasi atas penjelasan data (Huberman, 1992:16).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemerintahan VOC di Jambi

Seperti yang kita ketahui, kedatangan bangsa Belanda di Nusantara, khususnya di daerah Jambi, bukan hanya untuk kepentingan bisnis atau semacamnya, melainkan memiliki maksud atau tujuan tertentu yang ingin dicapai. Salah satunya adalah menjajah dan menguasai daerah jajahan. Banyak kebijakan yang diterapkan di Nusantara selama pendudukan Belanda, termasuk desentralisasi, birokrasi, dan feodalisme yang berpihak pada pemerintah kolonialnya sendiri.

Belanda di bawah pemerintahannya sendiri memiliki dasar pemerintahan Hindia Belanda yaitu Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda yang diundangkan langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda (1925). Pengaruh langsung dan tidak langsung yang dilakukan atau diajarkan oleh pemerintah Belanda terhadap penduduk pribumi sedikit banyak berpengaruh dalam merubah sistem pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi di Nusantara yaitu hilangnya sistem kerajaan (raja yang menguasai wilayah), tidak lagi menjadi raja (Laely, 2018:5).

Jambi adalah salah satu daerah yang ingin dijadikan daerah utuh oleh Belanda. Oleh karena itu Belanda ingin menjadikan daerah Jambi sebagai daerah pemukiman penduduk yang didominasi Belanda di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan banyak perubahan terutama di wilayah administrasi Jambi. Karena Belanda sendiri memiliki kebijakan untuk tidak bertindak sewenang-wenang menggulingkan sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan yang sebelumnya ada di daerah dimana Belanda berada, maka Belanda kemudian berupaya menjalin hubungan politik dengan Belanda. pemerintahan yang ada. untuk memberikan pemahaman tentang politik Belanda sehingga secara tidak langsung Belanda dapat menguasai wilayah tersebut secara perlahan.

Kesultanan Jambi resmi runtuh pada tahun 1906 dan kemudian pemukiman Jambi berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Kebijakan Belanda saat itu adalah mengharmonisasikan hukum masyarakat tergantung di mana Anda tinggal. Secara resmi menilai bahwa Belanda mulai menduduki daerah Jambi pada awal abad ke-20 (Ayu dkk, 2022:18). Sejak awal monopoli perdagangan yang dikelola langsung oleh pemerintah

Belanda, Jambi menjadi penduduk di bawah pemerintahan Hindia Belanda melalui surat keputusan Ratu Belanda pada tanggal 4 Mei 1906. Atas keputusan tersebut di atas, Jambi ditetapkan sebagai kawasan pemukiman mulai tahun 1906. Adapun nama-nama warga yang mengurus Jambi adalah sebagai berikut :

1. O.l. Tahun Helfrich (1906-1908)
2. A.J.N. Tahun Engleberg (1908-1910)
3. Th.A.L. Tahun-tahun Heyting (1910-1913)
4. Tahun A.L. Camerling (1913-1915)
5. H.C.E. Tahun Qwaast (1915-1918)
- 6.H.L.C. Tahun Petri (1918-1923)
7. C. Tahun-tahun orang miskin (1923-1925)
8. G.J. Tahun Van Dongen (1925-1927)
9. H.E.K. Tahun Ezerman (1927-1928)
10. J.R.F. Versoohor Van Nosee tahun (1928-1931)
11. Tahun W. Tain Buch (1931-1933)
12. H.J. Van De Meulan tahun (1933-1936)
13. M.J. Ruyschaver tahun (1936-1940)
14. Tahun-tahun yang berulang (1949-1942).

Banyak perubahan yang terjadi di wilayah Jambi sejak awal abad ke-20 saat pemerintah Belanda mulai menduduki Jambi, terutama di wilayah kebijakan pemerintah Belanda yang berubah. Seperti diketahui sebelum kedatangan Belanda di wilayah Jambi, pada masa kesultanan pemerintahan wilayah Jambi secara berturut-turut dipimpin oleh sultan, Jenang, Nissu, Penghulu, Tuo-Tuo dan Tenggana. Meskipun struktur pemerintahan Belanda dapat dilihat sebagai berikut:

1. Ressen: kepala gewes/keresi
2. Counter : kepala afdeling/daerah/kabupaten
3. Demang : Camat/kewedanan
4. Asietan demang : kepala onder distrik/distrik
5. Kepala adat : kepala daerah (desa)

Saat Belanda menduduki Jambi, Jambi merupakan salah satu dari 10 wilayah yang didirikan Belanda di Sumatera Timur. Sejak Jambi jatuh ke tangan Belanda, terjadi banyak perubahan dalam pemerintahan dan kekuasaan Jambi, antara lain kebijakan pintu terbuka dan kebijakan etika. Sistem yang dikuasai Belanda di Jambi adalah sistem politik liberal.

Desentralisasi, birokrasi dan feodalisme adalah sistem administrasi yang digunakan untuk kepentingan politik kolonial pada masa pendudukan Belanda. Pada saat yang sama, pemerintah Belanda memiliki prinsip pemerintahan, yaitu penggabungan masyarakat hukum yang mengelompokkan beberapa desa kecil dalam wilayah hukum dan yang wilayahnya memiliki properti sendiri tergantung pada tempat tinggal masyarakat hukum tersebut.

Banyak keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda dengan menduduki wilayah Jambi, salah satunya di bidang pertanian dimana perkebunan yang sangat besar dan hasil pertanian manusia hanya mengalir ke Belanda. Dengan demikian, Belanda mendapat keuntungan besar dari pemerintah Belanda dan sektor swasta yang mengeksport hasil perkebunan ke luar negeri. Dalam pemerintahannya sendiri, Belanda

akhirnya mampu memimpin pemerintahan di wilayah Jambi, membiarkan Belanda bebas berpolitik bebas liberal dan memonopoli perdagangan, tidak melupakan pengaruh ideologi barat terhadap masyarakat Jambi.

Selain itu, Jambi juga memiliki kepentingan tersendiri yaitu dalam pembangunan ekonomi dimana Jambi mengalami masa keemasan atau kejayaannya. Jambi tercatat sebagai pelabuhan ekspor hasil tambang dan hasil hutan seperti minyak, emas, karet dan lada, yang diproduksi di negara Jambi dan laris manis di pasar internasional.

Gambar 1. Markas Pertahanan VOC di Muara Kumpeh, Jambi (Kajanglako. 2020)



Perkembangan Politik Liberal di Jambi

Kedatangan Belanda di Jambi menimbulkan efek baru yaitu reformasi sistem politik Jambi. Sistem politik dapat merupakan kumpulan pendapat yang membentuk suatu entitas yang terkait dengan pemerintahan langsung dan menjalankan serta mempertahankan kontrol dengan mendefinisikan hubungan antara satu orang dengan orang lain atau dengan negara dan antara negara dan negara yang dikuasai negara bangsa lain (Sholekha, 2022:7).

Pada tahun 1643, pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil atau dikenal dengan Depati Anom, beliau melanjutkan pemerintahan Sultan Abdul Kahar yang pada saat itu sedang terjadi konflik antara Jambi dan Johor. Dalam situasi itu, tekanan VOC yang ada menjadi suatu keharusan bagi Sultan Jambi untuk bekerjasama dengan Belanda dalam bidang ekonomi dan pemerintahan. Penandatanganan perjanjian antara Kesultanan Jambi dengan Belanda merupakan cerita yang sangat penting karena untuk pertama kalinya Kesultanan Jambi menandatangani perjanjian dengan Belanda. Demikianlah awal campur tangan politik Belanda dalam urusan pemerintahan Kesultanan Jambi. Saat itu, Jambi juga berusaha menaklukkan Johor dan dengan bantuan Belanda, Johor berhasil ditaklukkan sehingga Belanda dibebaskan untuk mengembangkan misi politiknya sebagai imbalan (Putri, 2021:43).

Sistem administrasi pada masa pendudukan Belanda memperkenalkan desentralisasi, birokrasi dan feodalisme. Ini merupakan bentuk kepentingan politik-kolonial, yaitu upaya menguasai wilayah dengan cara menduduki dan memanfaatkan potensi wilayah dengan paksaan dan perundang-undangan (Suryani, 2021:54).

Prinsip pemerintah Belanda adalah mempersatukan masyarakat hukum dengan menggabungkan beberapa desa kecil di daerah hukum dan wilayahnya sendiri,

tergantung di mana masyarakat hukum itu tinggal. Oleh karena itu, tatanan Tata Adat tetap digunakan pada masa Belanda, sedangkan tatanan pada masa Kesultanan hanya menyesuaikan Belanda dengan kebijakan kolonialnya. Kebijakan pemerintah kolonial saat itu tidak meniadakan sistem ketatanegaraan yang ada. Pemerintah kolonial menjalankan kekuasaan politiknya di kerajaan yang masih dihormati oleh penduduknya. Dalam membentuk hubungan politik, motif terpenting kekuasaan kolonial adalah pengaruh politiknya terhadap kebijakan elit kerajaan.

Pada tahun 1875 pemerintah Belanda melakukan perubahan tata cara dalam pemerintahan yang diwakili oleh Jambi. Komandan garnisun dan utusan khusus diserahkan kepada residen. Ia menyarankan agar kepemimpinan politik tidak diserahkan kepada militer tetapi kepada pejabat yang bertugas membantu warga, sesuai Surat Keputusan Pemerintah No. 18 tanggal 28 Juni 1987. Memerintahkan agar klien sementara menjalankan tugas politik di Jambi. Ketika Sultan Taha menolak menandatangani perjanjian mendirikan pemerintahan di wilayah hulu Jambi, pemerintah Belanda melakukan perubahan politik di Jambi, dan Sultan Taha wafat pada tahun 1904. Belanda berhasil menguasai Jambi secara efektif (Solehkhah, 2022:8).

Ada dua sistem politik lain dalam sistem politik liberal, yang pertama adalah sistem politik terbuka dan yang kedua adalah sistem politik etis. Sistem politik pintu terbuka merupakan perpaduan antara strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dengan cara membagi kelompok besar menjadi kelompok kecil yang lebih mudah ditundukkan.

Isi kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu adalah merubah sistem pemerintahan dari kesultanan menjadi keresidenan, kedudukan kesultanan dijabatani dan diganti dengan keresidenan, wilayah kerajaan diambil alih Belanda dan Belanda mengirim penguasanya ke dalam. Perubahan sistem manajemen pada saat itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I. Peristiwa Politik tahun 1906-1920

| No | Thn | Kejadian bersejarah |
|----|------|--|
| 1. | 1906 | Pada tahun 1906 sampai tahun 1916 pemerintahan penduduk asli melihat beberapa perubahan dalam reorganisasi pemerintahan, Jambi diperintah oleh lima penduduk yang masih muda dan belum berpengalaman. |
| 2. | 1908 | Sistem <i>Onderafdeling</i> Kab. Bangko memiliki 161 desa dengan 372 kepala desa dan 15 kecamatan. |
| 3. | 1912 | Setelah adanya sistem <i>Onderafdeling</i> yang terlalu ekstensif, penyelenggaraan pemerintahan kabupaten ditata kembali. Sistem pemerintahan Kesultanan Iama dihapuskan ketika Jambi dianeksasi oleh HindiaBelanda. |
| 4. | 1914 | Ketika masyarakat mengetahui bahwa pemerintah Belanda telah memperoleh otonomi dalam bentuk Gemente Baca (dari kota Madia) yang berpihak kepada penjajah, masyarakat menjadi kacau balau. |
| 5. | 1915 | MuaraTembesI, sistem <i>Onderafdeling</i> dibagi menjadi 3 distrik, salah satunya adalah administrasi pemerintahan Belanda. |

| | | |
|-----|------|---|
| 6. | 1916 | Pembagian administrasi Kesatuan NanBetigo Dalam terbagi menjadi 9 kecamatan, salah satunya MuaraBungo, sehingga rumah masyarakat di kawasan MuaraBungo berada di tepi sungai. |
| 7. | 1917 | Padamasa residensi, jumlah penduduk Jambi sebanyak 138.539 jiwa |
| 8. | 1918 | Antara tahun 1914 dan 1918 terjadi gejolak sosial di masyarakat karena mereka mengetahui pemerintah Belanda memberikan otonomi berupa Iukugemeente (Kota Penulisan) untuk kepentingan penjajah. |
| 9. | 1919 | Hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di wilayah Jambi pada tahun 1914-1919, krisis pangan terutama bahan pokok seperti beras akibat PerangDunia I akibat. |
| 10. | 1920 | Banyak orang pindah ke berbagai jalur karena kerja paksa oleh Belanda. |

(Sumber: Suryani, 2021:5)

Keuntungan yang diperoleh Pemerintah Belanda hasil perkebunan manusia mengalir ke pemerintah Belanda, dan pihak Belanda meraup keuntungan yang sangat besar bagi swasta Belanda dan pemerintah Belanda. Kemudian Belanda mampu menguasai wilayah Jambi, menerapkan kebijakan liberal dan memonopoli perdagangan bebas, serta menanamkan ideologi Barat di Jambi.

Pembangunan ekonomi Jambi berlanjut setelah Belanda menerapkan kebijakan etis seperti membuka perkebunan besar, memperkenalkan tanaman ekspor yang laris di pasar internasional, dan memulai penambangan emas dan minyak di Jambi. (Seprina, 2021:89) Perkembangan ekonomi wilayah Jambi terus berkembang, termasuk Jambi sebagai pelabuhan ekspor produk dalam negeri Minangkabau seperti emas, lada dan hasil hutan Jambi sendiri. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, Jambi menjadi terkenal dengan hasil pertanian lainnya seperti ekstraksi karet dan minyak. Pada tahun 1920, ekonomi Jambi tumbuh, pemilik modal swasta datang ke Jambi, dan tanah tumbuh dan digunakan secara luas baik oleh pemerintah maupun swasta untuk membuka perkebunan ekspor (Seprina, 2021:89).

Rakyat Jambi mengalami kesulitan akibat depresi ekonomi tahun 1930-an. Perekonomian berangsur-angsur membaik pada tahun 1937 dengan permintaan karet yang membludak, memungkinkan Jambi untuk kembali sejahtera. Periode ini juga dikenal sebagai periode kupon (Seprina, 2021:90). Perkembangan di bidang sosial budaya yaitu adanya Westernisme dan Kristen. Mengemudi politik Belanda terutama yang berpihak pada agama Kristen dan juga menerapkan gaya modern mereka ke Jambi (gaya hidup barat) seperti perjudian, candu dan lain-lain (Seprina, 2021:89). Belanda kemudian bermaksud untuk mencabut gelar penguasa wilayah Jambi saat berkuasa di kesultanan, Belanda melakukan hal tersebut agar tidak membangkitkan semangat masyarakat untuk menentang pemerintah Belanda (Putri, 2021:63).

Gambar 2. Pemberontakan Rakyat Jambi pada Belanda di Muara Kumpeh (Sindo, 2020)



Sistem Politik Pemerintahan Belanda di Jambi Sebagai Bahan Ajar Sejarah

Bahan ajar adalah materi yang disusun secara sistematis untuk acuan belajar peserta didik yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Menurut (Magdalena dkk, 2020:312) bahan ajar adalah bahan pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pembuatan bahan ajar tentunya tidak terlepas dari manfaat dan tujuan dari bahan ajar tersebut. Bahan ajar dapat terpenuhi apabila sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan keperluan peserta didik, dengan adanya pengembangan bahan ajar memudahkan peserta didik untuk menambah wawasan dan pengetahuan menjadi lebih luas.

Dalam pembelajaran sejarah perlu adanya bahan ajar yang sesuai dengan muatan di setiap daerah, bahan ajar menjadi sangat penting dalam pembelajaran sejarah karena materi-materi seperti sejarah lokal yang relevan dengan sejarah nasional akan tersusun dengan baik sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami sejarah yang ada.

Sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi merupakan salah satu bahan ajar yang dapat dimasukkan ke dalam buku pelajaran berdasarkan kurikulum sejarah 2013, khususnya materi K.I dan K.D tentang kolonialisme dan imperialisme Indonesia. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Kompetensi Inti :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli gotong royong, toleran, damai, santun, tanggap dan pro aktif serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, dan menerapkan pengetahuan procedural pada bidang studi tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan diri yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar dalam Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah Indonesia:

- 3.1. Mengkaji konsep perubahan, dan kesinambungan dalam peristiwa sejarah pada masa penjajahan asing hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia
- 3.2. Menganalisis proses masuk dan perkembangan kolonialisme barat di Indonesia
- 3.3. Menganalisis strategi perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20
- 3.4. Menganalisis persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, masa sumpah pemuda, masa sesudahnya hingga proklamasi kemerdekaan
- 3.5. Mengidentifikasi dampak politik, budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan masa kolonial barat terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat ini
- 4.1. Mengolah informasi tentang peristiwa sejarah pada masa penjajahan bangsa barat berdasarkan konsep perubahan dan kontinuitas, serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah
- 4.2. Mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan barat di Indonesia serta menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah
- 4.3. Mengolah informasi tentang strategi perlawanan Indonesia melawan kolonialisme barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah
- 4.4. Mengolah informasi tentang persamaan dan perbedaan pendekatan dan strategi pergerakan nasional di Indonesia pada masa awal kebangkitan nasional, masa sumpah pemuda, pasca proklamasi kemerdekaan dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah
- 4.5. Menjelajahi dampak politik, sosial, budaya-ekonomi dan pendidikan masa kolonial barat terhadap kehidupan masyarakat Indonesia saat ini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah

Tabel 2 Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII

| Materipokok sejarah Indonesia | Materiberbasis Iokal |
|--|--|
| Sistem Politik Masa Demokrasi Liberal 1. Proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia 2. Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20 | Sistem Politik Pemerintahan Belanda diJambi 1. Masukya bangsa Belanda dijambi 2. Pemerintahan Belanda dijambi 3. Perkembangan pendidikan politik liberal masa Kolonial Belanda di Jambi |

Pada matapelajaran sejarah Indonesia terlihat bahwa K.1 dan K.D kelas XII pada kurikulum 2013 saling berkaitan mengenai proses masuk dan berkembangnya kolonialisme barat di Indonesia dan strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme barat di Indonesia sebelumnya. dan setelah abad ke-20, salah satunya diJambi yang menjadi Karesidenan Belanda. Kompetensi dasar kurikulum 2013 matapelajaran peminatan sejarah adalah:

- 3.3. Mengevaluasi pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan agama

4.3. Menyajikan hasil evaluasi pengaruh imperialisme dan kolonialisme Barat di Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan dalam bentuk tulisan dan media lainnya.

Tabel 3. Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Peminatan Sejarah kelas XII

| Materi pokok sejarah peminatan | Materi berbasis lokal |
|---|---|
| Respon Bangsa Indonesia terhadap Imperialisme dan Kolonialisme 1. dibidang politik 2. dibidang ekonomi 3. dibidang sosial budaya 4. dibidang pendidikan | Sistem Politik Pemerintahan Belanda di Jambi 1. Masuknya bangsa belanda di jambi 2. Pemerintahan Belanda di jambi 3. Perkembangan politik liberal masa Kolonial Belanda di Jambi |

Pada mata pelajaran sejarah peminatan dapat dilihat KI dan KD kelas XII kurikulum 2013 yang saling berhubungan mengenai materi pembelajaran penjajahan Belanda di wilayah Indonesia, salah satunya di Jambi yang menjadi wilayah Keresidenan Belanda.

Sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi merupakan salah satu bahan ajar yang bisa dimasukkan dalam buku ajar berdasarkan kurikulum merdeka, khusus materi Kolonialisme dan Imperialisme mengenai sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat alur tujuan pembelajaran dan indikator penilaian kurikulum merdeka sebagai berikut:

Tabel 4. Alur Tujuan Pembelajaran dan Indikator Penilaian Kurikulum Merdeka

| Alur tujuan pembelajaran | Alur tujuan pembelajaran | Indikator Penilaian |
|--|--|---|
| 11.7. Menjelaskan konsep Imperialisme dan Kolonialisme | 11.8. Menguraikan perlawanan-perlawanan yang terjadi terhadap kolonialisme di berbagai wilayah Indonesia | Menjelaskan konsep Imperialisme dan kolonialisme di Indonesia Materi Pokok : 12. Pengertian Imperialisme dan Kolonialisme 13. Perbedaan dan Persamaan Imperialisme dan Kolonialisme 14. Perkembangan Kolonialisme Di Indonesia 15. Perlawanan-perlawanan yang terjadi terhadap kolonialisme di Indonesia 16. Peran tokoh (Raja, Pemuka Agama, Pedagang) dalam perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia Materi Lokal : 17. Masuknya bangsa belanda di jambi 18. Pemerintahan Belanda di Jambi 19. Perkembangan politik liberal masa Kolonial Belanda di Jambi |

Pada alur tujuan pembelajaran dan indikator penilaian dalam kurikulum merdeka, dapat dilihat bahwasannya materi pembelajaran sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi memiliki hubungan pada materi kolonialisme Belanda dan memungkinkan untuk diterapkan di SMA wilayah-wilayah Indonesia, salah satunya di SMAN 8 Kota Jambi.

Berdasarkan table II, III, dan IV di atas, sistem politik pemerintahan Belanda tahun 1906-1942 sebagai bahan ajar di SMAN 8 Kota Jambi dapat diterapkan pada bahan ajar mata pelajaran baik sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan dengan keterkaitan antara sistem politik pemerintah Belanda dengan perkembangan politik kolonial liberal di Jambi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat diartikan sebagai guna, faedah. Bermanfaat yaitu berguna dalam pemanfaatan penelitian ini sebagai penggunaan bahan ajar mengenai sistem politik pemerintahan Belanda yang terjadi di Jambi pada tahun 1906-1942. Selain sebagai bahanajar pembelajaran sejarah nasional dan lokal, penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran baru mengenai system politik liberal Belanda di daerah Jambi.

KESIMPULAN

Jambi adalah salah satu wilayah di Sumatera yang memiliki kekayaan alam melimpah dan menjadikan Belanda tertarik untuk menguasai Jambi. Usaha yang dilakukan Belanda untuk menguasai Jambi berhasil dengan membentuk Jambi menjadi salah satu wilayah keresidenan. Politik liberal kolonial ialah suatu usaha untuk menguasai daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan cara perundangan maupun cara kekerasan. Sistem politik pemerintahan Belanda dapat dijadikan sebagai bahan ajar mata pelajaran sejarah Indonesia dan peminatan sejarah yang dapat dimasukkan ke dalam buku teks untuk kemudian diterapkn sesuai K.D serta materi yang berkaitan dengan sistem politik pemerintahan Belanda. Pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dapat memberikan wawasan bagi siswa dalam mengenal lingkungan sekitar yang memiliki sejarah. Penggunaan bahan ajar sejarah Indonesia dengan materi analisis sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi juga bermanfaat untuk menanamkan rasa cinta tanah air, membangun jiwa patriotism, rasa nasionalism dan bela negara pada siswa/i. Oleh karena itu, sudah sewajarnya siswa mengenal lingkungan sekitar dan sebaiknya ada buku pelajaran bagi pendidik dan siswa yang berkaitan dengan sistem politik pemerintahan Belanda di Jambi atau buku sejarah daerah lainnya agar proses pembelajaran berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarita, Y. et al. (2022). Perkembangan Pertambangan Minyak Bajubang di Kabupaten Batanghari Masa Kedudukan Jepang. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Vol. 1, No. 2, pp. 173-185.
- Ayu Wulandari, M. et al. (2022). *Pemerintahan dan Politik Etis Serta Penerapannya di Jambi*. *Jurnal Sejarah*. Vol. 2, No. 2, pp. 14-26.
- Kajanglako. (2020) *Markas Pertahanan VOC di Kumpeh, Jambi*. <http://kajanglako.com/id-11204-post-markas-voc-yang-pertama-di-jambi-7.html> Gambar. 1 Diakses Pada Selasa 21 Maret 2023 Pukul 09:00

- Laely, Nur. (2018) *Sistem Pemerintahan Kolonial Belanda Onderafdeling Bonthain 1905-1942*. Pendidikan IPS, Kekhususan Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana: Universitas Negeri Semarang.
- Magdalena. Ina, et al. (2020). Analisis Bahan Ajar. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 2, No. 2, pp. 311-326.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Putri, Seibahar Sari (2021) *Sejarah Jambi Masa Keresidenan 1906-1942*. Skripsi: Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi.
- Seprina, R. (2021). Study Perkembangan Perekonomian Jambi Masa Hindia-Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Berbasis Lokal. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*. Vol. 1, No. 1, Pp. 84-93. DOI: <https://doi.org/10.22437/jeso.v1i1.15487>
- Seprina, R. et al. (2022). Perjuangan Abdul Wahid VS Kolonial Belanda di Jambi (1916): Study Pengembangan Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jambi*. Vol. 1, No. 2, pp. 1-10. DOI: <https://doi.org/10.22437/jeso.v2i1.17989>
- Sholekhah, S. et al. (2022). Jambi Masa Kolonialisme Imperialisme Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah: Study Kasus Sistem Pemerintahan Belanda Tahun 1615-1942. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah FKIP Universitas Jambi*. Vol. 1, No. 2, Pp. 1-17.
- Sindo. (2020) *Kisah Pemberontakan Rakyat Jambi terhadap Penjajah Belanda*. <https://daerah.sindonews.com/read/134828/174/kisah-pemberontakanrakyat-jambi-terhadap-penjajah-belanda-1597518529> Gambar. 2 Diakses Pada Selasa 21 Maret 2023 Pukul 09:15
- Syandra Suryani, W. (2021). *Peranan Rio Dalam Pemerintahan Masyarakat Jambi Pada Masa Keresidenan Belanda (1906-1925)*. Skripsi: Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Batanghari Jambi.